

Catatan Akhir Tahun 2007
Perkumpulan Scale Up (Kemitraan Pembangunan Sosial Berkelanjutan)
Konflik Sosial HTI di Riau sepanjang tahun 2007

No	Komunitas Yang Berkonflik	Karakter Konflik	Perusahaan Yang Terlibat	Upaya Penyelesaian Konflik	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	petak 385 di kelurahan Okura kecamatan rumbai pesisir pekanbaru.	<p>Di duga sebagai pelaku perambahan dan penebang pohon akasia dalam kawasan HTI PT AA petak 385 di kelurahan Okura kecamatan rumbai pesisir pekanbaru. Seorang berinisial ID diamankan di mapolsek rumbai</p> <p>Sekitar pukul 10.00 wib saat mengangkat dan membersihkan beberapa potongan akasia yang ditebangnya. ID mengaku menebang akasia untuk membuka kebun sawit seluas 1 setengah Hektar. Berdasarkan ketentuan hukum bahwa petak 385 ini merupakan bagian dari 1.400 hektar kawasan HTI PT AA –IKPP berdasarkan SK Menhut No. 743/KPTS/III/2006.</p> <p>Kawasan HTI PT AA telah berubah fungsi menjadi kawasan perkebunan sawit diperkirakan mencapai 100 hingga 200 hektar. Selama ini telah diamankan sekitar 21 pelaku ilegal logging dan dua alat berat jenis eskavator di aral HTI PT AA. Rohil</p>	PT Arara Abadi	Keamanan /kepolisian	Riau mandiri, 10 agustus 2006 Rambah kawasan HTI PT AA warga perawang diamankan
2	lima desa di kecamatan pinggir (tasik serai, beringing, melibur, sariwangi, dan tasik serai timur).	<p>Duri, konflik antara masyarakat lima desa di kecamatan pinggir (tasik serai, beringing, melibur, sariwangi, dan tasik serai timur). Saling klim lahan masih terus terjadi menunggu hasil keputusan TIM Terhadap Pemerintah Bengkalis.</p> <p>Lambannya penanganan komplik ini sehingga menimbulkan korban pada April 2006. lima desa ini dikalim berada di dalam konsensi PT arara Abadi</p> <p>Sejak masuknya PT AA tahun 1996 status desa menjadi tidak menentu padahal masyarakat telah menempati desa tersebut sejak 1718, akibatnya masyarakat tidak bisa mengolah hutan ulayat yang sudah turun menurun, belakangan ini aksi perusahaan semakin menjadi-jadi, tumbuhan karet dan sawit warga dibludozer untuk selanjutnya ditanami akasia,.</p> <p>Jawaban pihak perusahaan mengenai asal usul lahan sebelumnya lokasi tersebut adalah HPH PT Murni timber sejak tahun 1984, yang habis tahun 1992, selanjutnya keluar izin HPHTI PT Arara Abadi pada</p>	PT. AA	<p>Kepada masyarakat dan perusahaan untuk menahan diri menunggu hasil tim terpadu pemkab bengkalis</p> <p>Wagub meminta PT AA menghentikan aktivitasnya dilahan sengketa dan juga mengharapkan kasus ini dapat diselesaikan sebelum januari 2007</p>	<p>Riau tribune, 24 juli 2006 Konflik warga lima desa –PT AA</p> <p>Dan Riau mandiri, 8 Nov 2006 Sengketa lahan PT AA dan warga lima desa Wagubri nilai pemkab bengkalis lamban</p> <p>Riau tribune 7 maret 2007 konflik panas PT AA –warga</p>

Catatan Akhir Tahun 2007
Perkumpulan Scale Up (Kemitraan Pembangunan Sosial Berkelanjutan)
Konflik Sosial HTI di Riau sepanjang tahun 2007

		tahun 1996 sebanyak 299.000 hektar diwilayah kampar dan bengkalis (sebelum pemekaran) yang didalamnya termasuk distrik beringin. Dasar SK Menhut tentang HPHTI PT AA adalah petak Bakosurtanal yang disebut peta rupa bumi dan citralandsat (peta satelit) yang dikeluarkan dephut RI. Dalam izin ini kami kantong tidak ada permukiman alias tanah kosong.			berawal dari aksi penyerobotan tanah
3	warga kepenghuluhan jumrah, kecamatan rimba melintang rokan hilir	<p>Sekitar 500 warga kepenghuluhan jumrah, kecamatan rimba melintang rokan hilir menolak kehadiran PT arara abadi dan PT ruas utama jaya anak perusahaan PT AA alasannya kedua perusahaan tidak memiliki izin lengkap.</p> <p>Masyarakat menyampaikan pernyataan sikap kepada camat rimba melintang, masyarakat siap menggugat kedua perusahaan kalau izin operasionalnya tidak masuk wilayah kabupaten rokan hilir.</p> <p>Pihak perusahaan menyatakan bahwa pihaknya sama sekali belum beroperasi diarial tersebut sedangkan pembuatan kanal pihaknya telah mendapatkan izin dari bupati. Kita tidak akan melakukan aktivitas tanpa izin.</p>	PT. AA	Surat dari masyarakat akan diteruskan kepada bupati rokan hilir menurut camat. Surat ini juga ditembuskan kepada kapolres rohil, kajari ujung tanjung.	Riau Mandiri, 11 Mei 2007 Diduga rambah hutan rimba melintang ratusan warga tolak PT AA dan RUJ
4	Sungai apit, warga desa mengkapan	. Penyanderaan ini terjadi ketika security PT AA melakukan pengukuran batas kawasan PT AA dengan masyarakat . warga yang telah menyimpan lama permasalahan dengan manajemen PT AA langsung mendatangi kedua security dan mobil perusahaan. Menurut masyarakat perusahaan pernah memberikan janji menyangkut penyelesaian sengketa lahan kepada warga yang sampai sekarang belum ada realisasinya	PT. AA		Riau mandiri, 8 mei 2007 Kesal janji muluk perusahaan warga mengkapan sandera security PT AA
5	Bagan siapi-api rantau bais	Kepala desa rantau bais syafriadi melaporkan PT AA ke dishut rohil terkait pencabutan dan pencincangan 8 ha lahan sawit warga diwilayahnya. Tujuan keberadaan perusahaan adalah untuk membina masyarakat bukan membinasakan . kejadian ini terjadi pada tanggal 10 Januari 2007 salah seorang warga melaporkan bahwa sawit mereka dicabut dan dicincang PT AA kepada kapolsek yang kemudian turun ke lokasi untuk membuktikannya hal ini dibuktikan dengan photo sawit yang berumur 1 tahun dicincang. Pihak perusahaan beralih tindakan mereka sesuai dengan SK tanggal 25 Noverber 1996 yang dikeluarkan menhut.	PT. AA	Jika sesuai dengan SK menhut hendaknya PT AA melakukan penyelesaian konflik secara baik sesuai dengan perundang-undangan bukan mencabut dan dicincang.	Riau mandiri, 19 feb 07, Rusak 8 ha sawit warga rantau bais dishut akan panggил PT AA

Catatan Akhir Tahun 2007
Perkumpulan Scale Up (Kemitraan Pembangunan Sosial Berkelanjutan)
Konflik Sosial HTI di Riau sepanjang tahun 2007

6	Masyarakat dari desa pinang sebatang barat kecamatan tualang dan desa mandiangin kecamatan minas.	<p>Tidak hanya mendapatkan perlakuan keras, kebun sawit masyarakat dimusnahkan dengan dicabut paksa oleh petugas PT AA sejak tahun 2005. kepala desa sampai ketua RT ada yang ditahan oleh polisi karena menolak menyerahkan surat tanah kepada perusahaan yang mengklaim lahan ditempati warga sebagai milik perusahaan yang dikuasi oleh masyarakat.</p> <p>Masyarakat mengatakan bahwa tindakan semena-mena PT AA dan aparat kepolisian bertolak belakang dengan kesepakatan yang dimediasi oleh Pemkab siak bahwa menyatakan lahan berstatus quo sampai ada hasil kajian. Pada saat tim sedang bekerja perusahaan PT AA melakukan pengerusakan tanaman sawit warga yang sudah berumur 5 tahun dan juga mengintimidasi agar segera menyerahkan surat tanah.</p> <p>7 orang masyarakat juga pernah ditahan oleh polisi siak tanpa adanya kejelasan .</p>	PT. AA		Riau mandiri, 18 januari 07 Lahan dirampas warga ditahan masyarakat tualang dan minas mengaku diintimidasi PT AA
7	Desa lubuk jering dan desa beca umbai kecamatan sungai mandau kab. Siak	Masyarakat mengklaim memiliki lahan seluas 140 ha pada lahan milik PT RAPP.	PT RAPP	Pihak kecamatan mencoba mempertemukan masyarakat dan PT RAPP pada bulan juli 2006 namun sampai saat ini belum ada titik terang penyelesaian masalahnya	Riau mandiri, 12 Juli 2006 Terkait konflik lahan riau pulp vs masyarakat; hari ini camat lakukan pertemuan dengan perusahaan
8	Suku talang mamak kecamatan peranap dan rakit kulim inhu	<p>Aktivitas besar-besaran terjadi atas lahan sebesar 13.450 ha hutan komunitas suku talang mamak di kecamatan peranap dan rakit kulim yang berlangsung sejak tahun 2002 oleh PT Bukit Betabuh Sei yang dijadikan kawasan HTI.</p> <p>Kawasan hutan tersebut seharusnya boleh dialihfungsikan berdasarkan kepmenhut No. 1 0.1/2000 yang menyebutkan kawasan hutan yang boleh dialih fungsikan merupakan hutan potensi tegakan kayu 10 M kubik/ha, sedangkan kawasan hutan ini 40,97 meter kubik/ha. PT bukit betabuh Sei mendapatkan izin prinsip dari bupati inhu 6 Mei 2002</p>	PT Bukit betabuh sei		Riau tribune 14 Juli 2006

Catatan Akhir Tahun 2007
Perkumpulan Scale Up (Kemitraan Pembangunan Sosial Berkelanjutan)
Konflik Sosial HTI di Riau sepanjang tahun 2007

9	Warga kelurahan tebing tinggi okura kecamatan rumbai pesisir	Sejumlah perwakilan warga kelurahan tebing tinggi mengadakan penyerobotan lahan masyarakat yang diduga dilakukan oleh PT surya Intisari raya (SIR) Penyerobotan lahan seluas 60 Ha ini diadakan ke DPRD Pekanbaru	PT surya Intisari raya (SIR)	Kasus penyerobotan lahan ini sudah sampai ke pihak kepolisian dan DPRD pekanbaru namun belum ada titik terang	Riau mandiri, 10 agustus 2006
10	Tanaman hutan rakyat di kampar	Sekitar 4.000 ha dari 6.175 ha lahan tahura diserobot oleh PT Arara Abadi	PT Arara Abadi		
11	AB Purba DPRD Riau	Anggota DPRD AB Purba dituduh melakukan penyerobotan lahan seluas 600 hektar yang merupakan milik HPHTI PT arara abadi, namun pernyataan ini dibantah oleh AB purba yang menyatakan bahwa hanya ada 50 Ha dan itu pun milik beberapa orang yang masing-masing memiliki 2 Ha. Serta menurut AB purba bahwa kawasan tersebut termasuk kawasan merah untuk HTI .	PT arara Abadi		
12	Desa Telayap Kecamatan Pelalawan kabupaten Pelalawan	PT Arara Abadi telah menggarap 18 ribu hektar tanah ulayat milik Batin Telayap. Tidak itu saja, anak perusahaan PT Indah Kiat Pulp and Paper tersebut juga mengambil lahan garapan masyarakat seluas hampir 1.500 hektar. 'peristiwa ini terjadi tahun 1994, banyak warga yang tak sempat memanen padi karena diusir aparat keamanan perusahaan. Bahkan hingga tahun 2006 ada 15 kepungan sialang digusur PT AA untuk perluasan HTI	PT. AA anak perusahaan PT. IKPP (sinar mas Group)	Tuntutan penyelesaian oleh warga dibantu oleh APPEL (Aliansi Pemuda Pelajar Pelalawan) sudah dilakukan sejak tahun 1999 dengan cara demo di DPRD dan Pemkab Pelalawan dan provinsi Riau	Riau Pos, 31 Mei 2007
13	6 desa (Muara Bungkal (40 Ha), Melibur (40 Ha), Tasik Serai Timur (40 Ha), Umar Kasil (80 Ha), Raso Kuning (25 Ha) dan Mandi Angin (80 Ha) Kecamatan Mandau dan Pinggir Kabupaten Bangkalis	Sekitar 1000 massa yang tergabung dalam Serikat Tani Riau (STR) menduduki dan menebang tanaman akasia (HTI) PT.AA. lahan yang ditebang hingga 7 Desember 2007 meliputi 40 ha di desa Muara Bungkal, 40 ha di desa Melibur, 40 ha di desa tasik serai timur, 80 hektar di desa Umar Kasil, 25 ha di desa Raso Kuning dan 80 ha di desa mandi angin. Warga mengklaim lahan tersebut merupakan tanah ulayat mereka, tapi sejak 1992 dikuasai oleh PT. AA dan ditanami akasia untuk menyuplai pabrik PT. IKPP.	PT. AA anak perusahaan PT. IKPP (Sinar Mas Group)	Upaya mediasi pemkab dan polres Bengkalis telah beberapa kali dilakukan. Demo besar-besaran juga sempat dilakukan dengan melibatkan desa-desa di kabupaten kampar dan Siak dengan jumlah massa mencapai 3000 orang dan sempat menginap di samping kantor Gubernur Riau (awal Maret 2007). Tahap mediasi hingga saat ini meminta Masing-masing pihak dituntut menyiapkan masing-masing bukti klaim, dan lahan	Berbagai media lokal dan nasional sejak Februari 2007

Catatan Akhir Tahun 2007
Perkumpulan Scale Up (Kemitraan Pembangunan Sosial Berkelanjutan)
Konflik Sosial HTI di Riau sepanjang tahun 2007

				di status quokan oleh Polda Riau.	
14	Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba, Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir, Desa Batas Kecamatan Tambusai, Desa Sei Komango Kec Tambusai, Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai	<p>Kelima desa ini menganggap PT Sumatra Silva Lestari dan PT Sumatra Riang Lestari Group dari RGM (Raja Garuda Mas) sejak tahun 1981 telah merampas tanah ulayat dan tanah masyarakat seluas 10.500 ha.</p> <p>Perusahaan memiliki izin HGU dari pemerintah pusat, sedangkan masyarakat lima desa bersama tokoh adat dan tokoh alim ulama lima desa, menyatakan bahwa tanah seluas 10.500 ha itu adalah tanah ulayat, dan masyarakat lima desa merasa tidak pernah diikutsertakan dalam hal perizinan HGU</p>	PT Balabaja / Kelompok RGM	<p>Pada tanggal 1 September 2003, Forum Lima Desa mengirim surat tentang Pengambilalihan Tanah Masyarakat Yang Telah diserobot oleh PT SSL / SRL / RGM, yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hulu. Pada 30 Juni 2003, masyarakat dan Lembaga Desa serta Pemerintah Desa yang tergabung dalam Forum Lima Desa sepakat untuk menyerahkan lahan seluas 10.500 ha yang habis masa HGU dari PT Palabaja / RGM dikembalikan kepada masyarakat guna untuk dijadikan kebun Kelapa Sawit yang akan menjadi tulang punggung masyarakat tersebut.</p> <p>Bupati Ramlan Zas merekomendasikan PT SSL dan SRL untuk memberikan lahan perkebunan sawit kepada lima desa ini, tetapi Bupati tidak menyebut luasan lahan yang akan diberikan.</p>	

Catatan Akhir Tahun 2007
Perkumpulan Scale Up (Kemitraan Pembangunan Sosial Berkelanjutan)
Konflik Sosial HTI di Riau sepanjang tahun 2007

15	Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Inhu Riau.	Sejak tahun 2002 PT Bukit Betabo Sei Indah mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan hutan tanaman seluas 13.450 ha. Pada 2005-pertengahan 2006, perusahaan telah membabat perkebunan karet masyarakat dan perkebunan sawit masyarakat untuk diganti tanaman akasia.	PT BBSI	Masyarakat marah dan melakukan pencabutan tanaman akasia yang ditanam di atas tanah ulayat suku asli Talang Mamak tersebut. Pada September 2006, kepala desa Talang Tujuh Buah Tangga ditangkap oleh Polsek Kecamatan kelayang dengan tuduhan melakukan provokasi dan pengrusakan lahan milik orang lain, yaitu milik PT BBSI. Kemudian masyarakat beramai-ramai menduduki kantor polsek Klayang. Kepala desa Tujuh Buah Tangga, Bapak Jafri di tahan selama 60 hari. Ini merupakan langkah kepolisisian yang membuat seakan-akan masyarakat melakukan kriminal, padahal PT BBSI lah yang melakukan penyerobotan lahan.	
16	Desa Pauh Ranap, Desa Pesajian dan Kelurahan pranap Kecamatan Pranap Inhu.	Masyarakat 16 desa bermusyawarah menghasilkan kesepakatan dengan Label Perjuangan Lembaga Kerapatan Adat Pranap Menolak Keberadaan PT Citra Sumber Sejahtera, Izin Prinsip dari Bupati seluas 16.500 ha, dan menolak keberadaan PT Artelindo Wiratama, izin prinsip dari Bupati seluas 20.000 ha. Karena kedua perusahaan sudah beroperasi dan membabat hutan tanah ulayat mereka seluas 16.000 ha maka masyarakat melalui lembaga kerapatan adat	PT Citra Sumber Sejahtera	Aksi yang dilakukan masyarakat adalah berdialog dengan camat Pranap Drs Hamdan, berdialog dengan anggota DPRD Inhu daerah pemilihan Pranap, Drs Sumrahardi dan kawan-kawan, menuntut agar aspirasi mereka untuk membangun perkebunan	

Catatan Akhir Tahun 2007
Perkumpulan Scale Up (Kemitraan Pembangunan Sosial Berkelanjutan)
Konflik Sosial HTI di Riau sepanjang tahun 2007

		<p>pranap meminta agar lahan tersebut tidak ditanami akasia, namun dibuatkan kebun kelapa sawit untuk masyarakat 16 desa.</p>		<p>sawit di atas areal IUPHHKHT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman) untuk PT artelindo Wiratama, direalisasikan.</p> <p>Perjuangan Lembaga Kerapatan Adat Pranap ini sedikit menemukan titik terang setelah pihak PT RAPP turun tangan, dengan menjanjikan ganti rugi dan perkebunan sawit yang diinginkan masyarakat. Namun sampai saat ini, janji tersebut belum terealisasi. Adapun tanaman sawit yang dijanjikan hanya berkisar 100 ha saja.</p>	